

Tukiran • Abdul Haris • Pande Made Kutaneegara • Setiadi

MOBILITAS PENDUDUK INDONESIA

Tinjauan Lintas Disiplin



Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan
Universitas Gadjah Mada

Bagian 3 Mobilitas Penduduk dan Konflik Sosial

Migrasi, Perubahan Sosial, dan Potensi Konflik <i>Djadja Saefullah</i>	153
Konflik dan Masalah Pengungsi di Indonesia <i>Sukamdi</i>	167
Migrasi Etnis Madura ke Sampit dan Konflik yang Terjadi <i>Murdijanto Purbangkoro</i>	191
Pengungsian dan Penderitaan Penduduk: Pengungsi Timor Timur di NTT <i>Rohadi Haryanto</i>	199

Bagian 4 Mobilitas Penduduk, Otonomi dan Pembangunan Daerah

Memahami Perubahan Demografi dan Realitas Sosial-Ekonomi Indonesia <i>Abdul Haris</i>	221
Migrasi dan Otonomi Daerah: Dapatkah Berjalan Bersama? <i>Agus Dwiyanto</i>	237
Mobilitas Penduduk dan Dampaknya terhadap Pembangunan Daerah <i>Kasto</i>	255
Akses terhadap Tanah dan Mobilitas Penduduk Pedesaan Jawa <i>Pande Made Kutanegara</i>	277
Migrasi, Politik, dan Pembangunan: Batak Toba di Simalungun <i>M. Arif Nasution dan Elvis F. Purba</i>	295
Komuting Perkotaan dan Pola Tata Ruang: Keseimbangan Rumah-Kerja dan Pola Komuting di Metropolitan Bandung <i>B. Kombaitan dan Tommy Firman</i>	315
Daftar Riwayat Hidup	335

MIGRASI, POLITIK, DAN PEMBANGUNAN

Batak Toba di Simalungun

M. Arif Nasution dan Elvis F. Purba

Simalungun adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatra Utara yang pada masa kolonial dan sesudahnya merupakan daerah tujuan migrasi orang Batak Toba yang berasal dari Tapanuli. Migrasi Batak Toba ke Simalungun (dan Pematangsiantar) tidak seluruhnya benar-benar spontan, tetapi dalam beberapa hal dipengaruhi, diatur, dan diprakarsai oleh pemerintah kolonial dan misioner Jerman (RMG) sesuai dengan politik dan strategi mereka. Kehadiran kaum tani Batak Toba diharapkan akan dapat memberikan contoh teladan hidup kristiani bagi penduduk setempat sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan petani bersangkutan. Di pihak lain kehadiran kaum tani di Simalungun dapat meningkatkan produksi pangan sebagai salah satu cara untuk mengatasi masalah pangan di kawasan Sumatra Timur yang penuh dengan perkebunan-perkebunan asing.

Dalam tulisan yang ringkas ini diuraikan perpindahan orang Batak Toba periode 1990 sampai dengan 1963/64. Hasil-hasil penelitian terdahulu menjadi acuan dalam penulisan ini.

Latar Belakang Migrasi ke Simalungun

Kedatangan Rheinische Missionengesellschaft (RMG) ke Pusat Tanah Batak telah membuahkan hasil yang cukup besar. Sejarah telah mencatat bahwa usaha-usaha RMG di bidang pendidikan, misalnya, telah menambah wawasan masyarakat (Aritonang, 1988) sehingga mereka ingin keluar dari pengisolasi diri selama beberapa abad sebelumnya. Demikian pula dalam bidang kesehatan, telah berhasil diturunkan angka kematian dan sejalan dengan usaha tersebut diperbesar pertumbuhan alami. Pertambahan penduduk yang pesat ternyata menimbulkan tekanan terhadap lahan pertanian, yakni semakin sulit membuka lahan pertanian baru yang dianggap potensial untuk tanaman pangan sekaligus bagi perkampungan penduduk.

Dalam masyarakat agraris, tanah merupakan salah satu faktor produksi yang penting. Selaras dengan itu dalam sistem nilai Batak Toba tradisional,

memiliki tanah memberikan status yang tinggi bagi mereka. Keinginan untuk menguasai dan mengusahai lahan yang relatif luas memungkinkan membangun *harajaon* buat diri dan anggota keluarga kelak. Dalam ungkapan "*lulu anak lulu tano*" yang arti harafiahnya suka akan anak, juga suka akan tanah, terkandung maksud tersebut di atas. Ungkapan ini dapat berarti kalau ada anak, (terutama lelaki) dan semakin banyak (*gabe, hagabeon*) perlu memperluas areal pertanian agar dapat memenuhi nafkah mereka dan keluarganya. Pada waktu itu pertanian merupakan satu sumber utama kebutuhan subsisten mereka sebagaimana dikemukakan oleh Keuning (1958) bahwa "*agriculture is and was the principle means of subsistence in the whole Batak region*". Untuk dapat menjamin hidup anggota-anggota keluarga, mereka harus mengusahakan pemilikan tanah dan lahan yang sempit harus diusahakan penambahan atau perluasannya agar hasil-hasil pertanian melimpah ruah yang memungkinkan mereka menjadi makmur (*mamora, hamoraon*). Walaupun pada masa itu ungkapan "*lulu anak lulu tano*" dapat dikaitkan dengan upaya setiap keluarga mendapatkan hasil pertanian di atas kebutuhan subsistennya, makna yang lebih mendasar ialah untuk meningkatkan harga diri (*hasangapon*).

Dalam masyarakat Batak Toba, kampung (*huta*) merupakan sel dari suatu organisme politik yang dibentuk oleh marga dan kelompok suku dalam hubungan kehidupan persekutuan (Vergouwen, 1964). Dilihat dari sudut ekologi kehidupan Batak, *huta* merupakan manifestasi konsep kerajaan (*harajaon*). Itulah sebabnya, setiap keluarga baru seyogianya membuka kampung-kampung baru. Selaras dengan itu Pedersen (1970) mengemukakannya berikut ini.

Jalan lain ke *harajaon* ialah mendirikan sebuah *huta* (*kamoung*) baru dengan merintis suatu daerah yang belum didiami. Mendirikan sebuah *huta* adalah suatu cara yang diakui untuk memperoleh prestise, tujuannya bukanlah terutama untuk mendapatkan kekayaan materiil tetapi lebih banyak untuk mendapatkan kedudukan sosial.

Pendapat Pedersen ini tidak bertentangan dengan pendapat Vergouwen (1964) yang menyatakannya sebagai berikut.

Sekali orang sudah mendirikan kampung, *memungka huta*, apakah dia sendiri (jarang) atau dengan bekerja sama dengan orang lain, berarti ia telah menciptakan buat diri sendiri dan buat anak lelakinya suatu masyarakat sendiri, dan dengan berbuat demikian dia dan keturunannya lelaki telah memperoleh hak untuk menjadi tuan di sana dan bebas menentukan boleh tidaknya orang tinggal di sana.

Ini adalah hukum yang berlaku teguh di mana-mana dan yang sepenuhnya menguasai kehidupan kampung.

Hal ini menunjukkan bahwa pembentukan *huta* merupakan salah satu cara untuk mewujudkan *harajaon*. Para pendirinya disebut *raja huta*, bahkan keturunan lelakinya memangku tugas dalam hal pengawasan intern kampung tersebut.

Para orang tua Batak Toba mempunyai suatu kewajiban terhadap anak-anaknya, yaitu apabila anaknya (laki-laki atau perempuan) sudah dianggap dewasa akan dinikahkan (*molo magodang anak pangolihonon, molo magodang boru pamulion*). Keluarga-keluarga yang baru membentuk rumah tangga pada akhirnya akan berdikari atau disebut *manjae*. Pada dasarnya proses *manjae* tersebut merupakan awal migrasi dalam konteks tradisional. Bertambahnya keluarga-keluarga muda yang baru *manjae* bukan hanya menyebabkan munculnya tempat-tempat tinggal yang baru, tetapi juga akan mendorong berdirinya kampung-kampung baru beserta lahan pertanian baru. Muncullah apa yang dinamakan *lumban* atau *sosor* yang merupakan kampung baru sebagai perluasan (ekspansi teritorial) kampung induk. Oleh karena itu, apa yang dikemukakan oleh Castles (1972) yakni bahwa wibawa atau kehormatan seseorang raja *huta* akan bertambah bila anak-anaknya mendirikan *huta-huta* baru dapat dibenarkan. Demikian juga dengan adanya keinginan dari seseorang bapak yang berpengaruh untuk melihat anak-anaknya dalam *harajaon* masing-masing (Vergouwen, 1964) berkaitan dengan aspek harga diri atau wibawa (*hasangapon*) yang dikemukakan di atas.

Kalau pada awalnya kampung-kampung baru cenderung dekat dengan kampung induk (*huta sabungan*), dalam jangka panjang pembukaan kampung-kampung baru akan menciptakan perpencaran dan makin sering berakibat jauh dari kampung asal. Mereka menyebar mula-mula ke daerah sekitar kampung-kampung induk dan akhirnya ke daerah yang lebih jauh di luar batas budaya sendiri. Proses kejadian seperti inilah yang disebut dengan *marserak* (Purba dan Purba, 1997) yang menyatakan penyebaran orang-orang Batak Toba keluar Tapanuli Utara.

Sejak pertengahan abad ke-19 kemungkinan untuk membuka lahan pertanian baru di Pusat Tanah Batak semakin berkurang. Penyebab yang utama adalah penambahan penduduk cukup pesat. Bahkan, pada awal abad tersebut telah dberitakan bahwa Tanah Batak yang disebut Tapanuli merupakan distrik yang sangat padat penduduknya (Burton dan Ward, 1827). Akibat kumulatif dari keinginan meningkatkan harga diri dan keterbatasan lahan pertanian mendorong dan memotivasi kaum tani meninggalkan

kampung halamannya. Mereka bagaikan pemburu lahan pertanian yang luas dan subur. Castles (1972) menyatakan bahwa keterbatasan lahan pertanian, terutama lahan persawahan akibat pertambahan penduduk, telah menyebabkan munculnya suatu tipe petani-petani yang haus lahan pertanian (*a type of land-hungry Toba Batak farmers*), yakni sejak awal abad ke 19.

Berbagai keterbatasan yang dihadapi di wilayah sendiri, seperti luas lahan pertanian yang relatif sempit atau karena kemiskinan, dapat mendorong mereka meninggalkan kampung halamannya, *bona pasogit*. Sementara itu cita-cita untuk mengejar 3H (*hagabeon, hamoraon, dan hasangapon*) tidak pernah padam dalam sanubari tiap orang Batak Toba. Idaman 3H tersebut mewarnai gerak langkah mereka termasuk penentu keputusan untuk pindah ke daerah lain.

Simalungun: Daerah Perluasan Kerja RMG dan Perkebunan Asing serta Pembangunan Pertanian Pangan

Sesudah sukses menjalankan misinya di Pusat Tanah Batak, misioner Jerman mulai menoleh ke daerah sekitarnya, di antaranya ke Simalungun. Upaya memperluas daerah kerja ke Simalungun dan berita tentang daerah tersebut diperoleh dari artikel yang ditulis oleh kontrolir Van Dijk dan informasi dari Guillaume (Saragih, 1979), kedua-duanya orang Belanda, tetapi mempunyai tugas yang berlainan. Semboyan mereka yang terkenal, yakni "*Tole*" yang berarti maju terus bermakna melanjutkan usaha untuk memberikan teladan hidup kristiani bagi penduduk tersebut. Tahun 1903 dimulailah perintisan oleh misioner dengan mengunjungi Simalungun. Sesudah melihat keadaan setempat, misioner beranggapan bahwa kaum tani yang tidak mempunyai lahan atau karena lahannya sangat sempit di Tapanuli akan tertarik membuka sendiri di Simalungun.

Tidak lama sesudah tersiar berita tentang keadaan Simalungun di Tapanuli, ada yang memberanikan diri memasuki Simalungun. Ada yang naik sampan dari Balige menuju Samosir terus ke Prapat dan dari sana melewati hutan terus ke Tigadolok menuju Siantar selama empat hari perjalanan. Sadar akan kebenaran berita kesuburan lahan Simalungun, sebagian ada yang memutuskan tinggal dan membuka perkampungan. Untuk menambah tenaga beberapa orang disuruh pulang dan sekaligus memberikan kabar kepada keluarga atau teman sekampung di Tapanuli agar mereka ikut dalam perjalanan berikutnya. Selain informasi dari orang yang pindah lebih dahulu, misioner memberitahukannya juga melalui majalah mingguan yang mereka asuh, yaitu *Immanuel*. Berita tentang kesuburan Simalungun akan cepat tersebar dan menarik perhatian, terutama bagi keluarga yang tidak

memiliki lahan yang luas. Sejak itu sebagian lagi mengikuti jalur yang dilalui para pendahulunya dan sebagian lagi menelusuri kaki bukit dari Lumban Julu terus ke Tigadolok dan dari sana menuju Siantar. Perjalanan yang melelahkan melewati hutan yang diselang-selingi terik matahari dan hujan tidak menjadi penghambat bagi mereka memasuki daerah Simalungun.

Sesudah tiba di tempat tujuan, segera dibuka hutan yang dianggap subur dan dipilih yang lebih mudah dikerjakan untuk lahan pertanian. Di lahan yang baru dibuka itu didirikan rumah-rumah darurat dengan atap lalang. Pada waktu itu belum ada lahan persawahan sehingga padi dan ubi ditanam di lahan kering yang baru dibuka, yang dikenal dengan *juma*. Lahan yang dibuka semakin lama semakin luas dan jumlah rumah darurat pun semakin banyak. Kemudian hari terbentuklah beberapa kampung yaitu kumpulan dari beberapa rumah yang berdekatan, seperti Sianjur, Banjarnahor, Sobu dan Tambunan, kemudian Gurgur dan Tombak Pulopulo. Inilah nama-nama kampung pertama yang dibuka kaum tani Batak Toba yang datang antara tahun 1903-1904 dan pendirinya menjadi raja hutan di kampung tersebut.

Sesuai dengan motif yang melatarbelakangi para missioner memperluas wilayah kerjanya ke Simalungun, pada tahun 1904 telah dimulai membuka persawahan di Pematang Bandar yang diprakarsai oleh misioner G.K. Simon. Proyek ini hanya berjalan beberapa lama karena ketiadaan irigasi sehingga hasilnya sangat sedikit dan akhirnya tutup (Joustra, 1915). Ketiadaan irigasi sehingga menyulitkan membuka persawahan menyebabkan kaum tani Batak Toba kurang tertarik tinggal di sana. Akhirnya, sebagian dari mereka meninggalkan Pematang Bandar dan pindah ke daerah lain, di antaranya ke Siantar dan Panai.

Selain dorongan dari diri sendiri, misioner Jerman mendukung perpindahan kaum tani Batak Toba dari Tapanuli ke Simalungun. Tahun 1905 semakin banyak yang pindah ke Panai dan juga ke Bandar. Petani yang sudah lebih dahulu tiba berusaha mengubah perladangan menjadi persawahan. Demikianlah pada tahun itu kaum tani yang tinggal dekat Siantar berhasil menggali tali air dari Sungai Bah Biak secara gotong-royong dengan berpedoman pada teknologi irigasi yang mereka bawa dari kampung aslinya. Sejak pembukaan tali air tersebut mulailah ada persawahan dan nama daerah itu pun berubah menjadi *Juma Saba*, yang bermakna perladangan (*juma*) berubah menjadi persawahan (*saba*).

Dalam beberapa tahun, areal pertanian pangan yang dibuka kaum tani Batak Toba semakin menunjukkan hasil yang mengagumkan. Keberhasilan tersebut ternyata mendapat perhatian pemerintah kolonial. Mereka

mengetahui bahwa kaum tani tersebut sungguh-sungguh mengerjakan lahan pertaniannya dan pendatang yang belakangan sangat bersemangat membuka lahan-lahan pertanian baru. Sadar akan kesungguhan dan keagresifan kaum tani tersebut, pemerintah kolonial melalui kontrolir Batubara mengadakan perjanjian dengan raja Bandar agar petani Batak Toba diberi kesempatan membuka persawahan di daerah itu (Sangti, 1977). Sejak perjanjian tersebut semakin banyak yang memasuki Bandar, walaupun belakangan banyak juga yang pindah ke daerah lain. Tahun 1906 ada yang datang dari Toba Holbung, Siindung dan Humbang ke Bandar dan dari sana menyebar ke daerah sekitarnya (Sihombing, 1961). Pada akhir tahun itu tercatat sebanyak 94 orang terdiri dari 40 laki-laki dewasa, 11 perempuan dewasa, dan 43 anak-anak yang datang dari Tapanuli tinggal di Pematang Bandar (Marbun, 1990).

Tahun 1907 pendatang baru dari Toba Holbung, Humbang, dan Silindung memasuki daerah Panai (Sihombing, 1961). Selain ke Panai banyak pula yang menuju Siantar, Dolok Merlawan, dan daerah lainnya, kecuali ke Tanah Jawa yang pada waktu itu merupakan daerah tertutup bagi orang Batak Toba. Mereka tidak diizinkan oleh pemerintah, yaitu kontrolir yang memerintah dan mengawasi rakyat di daerah itu (Sitompul, 1986). Sebagai kelanjutan upaya dan sesuai dengan misi pemerintah kolonial, pada September 1907, tujuh raja Simalungun menandatangani perjanjian singkat, *korte verklaring* (Reid, 1979). Walaupun penandatanganan perjanjian tersebut sebenarnya merupakan pengakuan terhadap kedaulatan Belanda di sana, hal tersebut tidak terlepas dari rencana pemerintah kolonial untuk mempermudah kaum tani Batak Toba memasuki Simalungun (Purba, 2001). Berkaitan dengan perjanjian tersebut dirintis pulalah perluasan perkebunan di Simalungun (Liddle, 1970, Pelzer, 1978). Pembukaan perkebunan tersebut akan membuka peluang bagi kaum terdidik Batak Toba mendapatkan pekerjaan di daerah itu.

Pada waktu itu orang Batak Toba terkonsentrasi di empat wilayah, yaitu Pematangsiantar, Juma Saba, Panai, dan Bandar Meratur (Sihombing, 1961), yakni sebagian dari daerah yang termasuk Simalungun Bawah. Di Juma-Saba, misalnya, lebih dari 110 orang yang terdiri dari 45 KK dan hanya satu kepala keluarga yang belum membawa istri dan anak-anaknya dari desa asal (Panitia, 1982). Pada tahun yang sama, di Bandar Meratur sudah ada 280 orang yang semuanya datang dengan tujuan untuk membuka persawahan (Tideman, 1922; Sangti, 1977).

Perkembangan perkebunan asing di Pantai Timur Sumatera Utara lambat laun menimbulkan kesulitan, terutama dalam hal bahan pangan. Kuli-kuli kontrak yang bekerja di perkebunan, yang terdiri dari orang Jawa yang

didatangkan dari Pulau Jawa dan orang Cina dari Singapura sudah mulai dilanda krisis bahan pangan, terutama beras. Selain sumbernya terbatas pada daerah tertentu, bagaimanapun krisis harus dapat dicegah, misalnya dengan memperluas lahan-lahan pertanian pangan di Sumatra Timur. Kendatipun perluasan lahan pertanian dapat dilakukan sehubungan dengan masih luasnya lahan yang kosong, akan timbul masalah berkaitan dengan siapa yang membuka lahan pertanian baru. Pemerintah kolonial tidak tinggal diam akan masalah tersebut karena mereka mengetahui bahwa kaum tani Batak Toba sangat gigih menguasai dan ahli dalam seluk-beluk pertanian sawah (Liddle, 1970; Oudemans, 1973). Perhatian terhadap petani itu bukan tanpa alasan karena pemerintah kolonial sudah menyaksikan sebelumnya bahwa kehadiran kaum tani itu di Simalungun menyebabkan lahan pertanian pangan semakin luas dan produksinya semakin meningkat. Sehubungan dengan itu lebih beralasan lagi bila jumlah petani bertambah dan lahan yang diusahakan juga bertambah luas. Dengan latar belakang pemikiran seperti itu Belanda mengadakan perjanjian lagi dengan Raja Panai tahun 1908 dengan harapan petani Batak Toba akan memperluas persawahan di sana (Tideman, 1922). Di samping sasaran politiknya, perjanjian-perjanjian yang dilakukan oleh pemerintah kolonial pada dasarnya bertujuan pula untuk memperbesar peluang dan mengatur perpindahan kaum tani Batak Toba ke daerah-daerah tertentu di Simalungun. Pemerintah kolonial mengharapkan bahwa kehadiran petani tersebut akan mendorong swasembada pangan.

Tampaknya strategi yang diterapkan pemerintah kolonial makin mendapat sambutan dari masyarakat. Pada tahun 1909, misalnya, Van Geldder melaporkan sebanyak 500 KK telah ditempatkan di dekat Pematangsiantar (Oudemans, 1973). Desakan kekurangan lahan pertanian di Tapanuli akan mempercepat mereka meninggalkan kampung halamannya. Makin lama makin banyak yang tinggal di Simalungun dengan pusat persawahan berada di Bah Korah I dan Korah II (Tideman, 1922; Sangti, 1977). Walaupun pada awalnya kehadiran kaum tani Batak Toba diharapkan dapat memberikan cara bercocok tanam di persawahan kepada penduduk setempat, tetapi kaum tani Simalungun kurang tertarik mengerjakan persawahan dan tetap mempertahankan sistem yang lama. Mereka ingin mempertahankan dan mengikuti tradisi berladang (Purba, 1992; Saragih, 1979). Berkaitan dengan itu orang Batak Simalungun lebih dominan di Simalungun Atas dan sebaliknya kaum tani Batak Toba terkonsentrasi di wilayah Simalungun Bawah.

Jumlah pendatang setiap tahun cenderung bertambah. Selain kaum tani, kaum terdidik pun memasuki Simalungun. Pembukaan perkebunan di

Tomuan, Pantoan, dan Nagahuta membuka kesempatan bagi sebagian penduduk yang mengecap pendidikan. Selain itu, beberapa tenaga pendidik (guru sekolah) dari Tapanuli ditempatkan di Simalungun. Usaha pemerintah kolonial untuk mencukupi kekurangan beras semakin diintensifkan dengan membuka lahan dan membuka saluran-saluran irigasi. Di Juma-Saba, misalnya, tali air yang telah dibangun secara gotong-royong tahun 1905 menjadi permanen tahun 1910. Sejak itu persawahan di Juma-Saba semakin luas dan kemudian hari daerah ini berubah nama menjadi Siantar Sawah. Jumlah pendatang baru pun semakin meningkat, bukan hanya ke Juma-Saba, tetapi juga ke Marihat, Simarimbun, dan lain-lain. Memang tahun 1910/1911 ketika terjadi wabah kolera banyak yang pindah bahkan ada yang sampai ke Tapanuli, tetapi mereka datang lagi setelah mengetahui wabah penyakit itu tidak ada lagi.

Salah satu daerah yang pada awalnya kurang menarik adalah Balata. Orang-orang Tapanuli selalu melewati daerah itu karena selain tanahnya bergelombang dan ditumbuhi padang lalang, tetapi juga selalu muncul pengacau. Namun, pada tahun 1911 orang-orang dari Humbang, Samosir, dan Toba Holbung mulai tinggal di sana untuk membuka pertanian. Pada awalnya hanya sedikit yang bersedia tinggal di sana sehingga tidak mengherankan jika jarak gubuk yang satu dengan yang lain bisa mencapai 1 km. Setelah mereka membuka pertanian di daerah itu orang Simalungun, terutama dari Jorlang Hataran datang ke Balata (Panjatan, 1923).

Pembukaan lahan-lahan pertanian pangan di berbagai daerah Simalungun, terutama di Simalungun Bawah, semakin menunjukkan hasil. Namun, kekurangan beras di Sumatra Timur semakin terasa. Perjanjian yang telah dibuat pemerintah kolonial dengan raja-raja Simalungun ternyata tidak menjamin perpindahan petani-petani Batak Toba secara besar-besaran. Oleh karena itu, pemerintah kolonial memikirkan cara lain untuk menarik perhatian kaum tani dari Tapanuli, terutama orang Batak Toba, agar memasuki Simalungun. Oleh karena itu, pemerintah kolonial menyodorkan beberapa jabatan kepala kepada yang berhasil membawa beberapa keluarga dari Tapanuli (Liddle, 1970; Oudemans, 1973). Jabatan tersebut diatur dalam tiga tingkatan, yakni Kepala Rodi bagi yang berhasil membawa 5 keluarga, Penghulu dengan membawa 7 keluarga, dan Raja Hutan apabila berhasil membawa 50 keluarga (Tideman, 1922; Sangti, 1977). Kendatipun jabatan tersebut merupakan sesuatu yang baru, tidak merupakan jaminan untuk mempercepat proses perpindahan. Namun, jabatan baru ini paling tidak akan mendapat perhatian dari orang yang tidak mendapat jabatan kepala atau gagal dalam pemilihan kepala di kampung masing-masing.

Sejak pembukaan irigasi, hasil pertanian pun mengalami kenaikan dan sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga yang pindah tersebut. Perubahan yang menggembirakan itu antara lain disebabkan naiknya harga beras, yakni 1 liter (sekitar 0,9 kg) harganya menjadi $\frac{1}{2}$ gulden. Demikian juga lalang yang sebelumnya kurang berguna berubah menjadi barang ekonomis. Setelah dianyam kemudian dijual ke perkebunan tembakau, di antaranya ke Tomuan.

Tahun-tahun selanjutnya semakin banyak petani yang memasuki Simalungun. Sebagian kaum terdidik dari Tapanuli memasuki Simalungun dan banyak pula yang meneruskan perjalanannya ke daerah lain. Tahun 1913, misalnya, sudah terdapat sekitar 6.500 orang Batak Toba di Simalungun (Tideman, 1922) dan luas persawahan sebanyak 720 Ha (Liddle, 1970). Para petani menempati rumah dan tinggal di sekitar persawahan mereka. Masing-masing keluarga memperoleh lahan seluas 1 ha (Oudemans, 1973). Selanjutnya, tahun 1914 dibukalah *Immigrate Bureau Tobaneezen* (Biro Urusan Migrasi) dan diangkatlah Andreas Simangunsong sebagai *Hoofd der Tobaneeze* (Raja Ihutan), untuk mengatur proses perpindahan itu. Di satu pihak penambahan jumlah petani yang memasuki Simalungun diharapkan berdampak positif terhadap pengadaan pangan, tetapi di pihak lain menimbulkan kesulitan juga bagi pemerintah kolonial dalam hal status mereka, yang kelak menimbulkan konflik dengan raja-raja setempat.

Sejak jalan raya dari Balata, Porsea, Prapat dan terus ke Pematangsiantar selesai dibuka tahun 1915 (Cunningham, 1958), daerah penyebaran mereka semakin luas di wilayah Simalungun Bawah seiring dengan semakin bertambahnya jumlah pendatang baru. Pada tahun itu jumlah seluruhnya mencapai 8.800 orang (Tideman, 1922), di antaranya lebih 1.900 orang di Juma-Saba (Panitia, 1982). Tanah Jawa yang pada tahun-tahun sebelumnya merupakan daerah tertutup menjadi daerah terbuka bagi mereka tahun 1917. Orang yang masuk ke sana diantaranya dari Toba Holbung, Humbang, Silindung dan dari Angkola (Sitompul, 1986). Tideman (1922) memperkirakan bahwa tahun 1917 sudah ada 11.250 pendatang Batak Toba di Simalungun dan persawahan meningkat menjadi 3.700 Ha tahun 1918 (Liddle, 1970). Kalau tahun 1919 jumlah pendatang mencapai 12.840 orang yang berarti bertambah sekitar 1.600 orang selama dua tahun maka pertambahan yang cukup berarti terjadi antara tahun 1919-1920, yaitu sekitar 7600 orang. Tahun 1920 jumlah pendatang mencapai 20.460 orang, tetapi yang tinggal di Simalungun (dan Pematangsiantar) sudah ada sebanyak 21.823 orang (Tideman, 1922), yakni sekitar 12 persen dari seluruh penduduk *onderafdeling* Simalungun ketika itu (Tabel 1).

Tabel 1
Penduduk Onderafdeling Simalungun, 1920*

	Jumlah	%
Penduduk Pribumi:		
Batak Simalungun	69.852	39,74
Batak Toba	21.832	12,42
Batak Mandailing	4.699	2,67
Indonesia lainnya	23.653**	13,46
Kuli Kontrak	44.040	25,06
Jumlah	164.076	93,95
Eropa	816	0,46
Asia lainnya	10.865	6,29
Jumlah	175.757	100,00

* Termasuk penduduk Pematangsiantar sebanyak 9.460 yang terdiri dari 6.096 pribumi, 203 Eropa dan 3.161 Asia lainnya.

** Pendetang dari daerah lain termasuk Jambi

Sumber: Tideman, 1922; 84, 187

Kendatipun dalam benaknya merasa berhasil menerapkan strateginya, pemerintah kolonial semakin kewalahan melihat banyaknya pendatang baru. Biro Urusan Migrasi yang dikepalai oleh Andreas Simangunsong hanya diperbolehkan sampai tahun 1918 dan dua jabatan lainnya akhirnya dihapus tahun 1921 (Meuraxa, 1973; Sangti 1977). Penghapusan jabatan-jabatan kepala tersebut ternyata tidak menghentikan arus migrasi dari Tapanuli. Pemerintah kolonial tampaknya kurang memahami bahwa pada dasarnya petani-petani tersebut ingin meninggalkan kampung halamannya. Hal ini terbukti dari kesediaan kaum tani yang telah pindah tersebut meninggalkan harta bendanya di kampung halamannya dengan membayar berbagai kewajiban adat, misalnya dengan membayar sejumlah uang ditambah pajak dan ongkos ganti rodi selama setahun (Sangti, 1977). Selain pindah menetap, ada juga yang datang sebagai pekerja musiman (*mangambo*) ke Simalungun, di antaranya dari Samosir sejak persawahan semakin berkurang di Samosir.

Berdasarkan sensus 1930 jumlah orang Batak Toba di *Onderafdeling* Simalungun 45.603 atau sekitar 16 persen dari seluruh penduduk daerah itu (Tabel 2). Dari jumlah tersebut, sebanyak 30.433 orang pindah dari Toba Holbung, Samosir, Humbang dan Silindung (Volkstelling, 1930). Berdasarkan angka tersebut jelas bahwa dalam kurun waktu satu dasawarsa jumlah orang Batak Toba yang tinggal di Simalungun menjadi dua kali lipat (dibandingkan

dengan tahun 1920). Dari antara daerah tujuan perpindahan orang Batak Toba, ternyata Simalungun menempati urutan teratas dilihat dari jumlah orang Batak Toba yang tinggal menurut *onderafdeling* di Karesidenan Tapanuli maupun Sumatra Timur (Volkstelling, 1930). Hal ini tidaklah mengherankan karena dibandingkan dengan daerah lain di Sumatra Timur, Simalungun memiliki persawahan yang lebih potensial, terutama di Simalungun Bawah. Inilah salah satu faktor penarik yang menyebabkan secara berduyun-duyun memasuki daerah ini. Pusat-pusat persawahan yang mereka bangun di beberapa daerah Simalungun telah menjadi contoh untuk menggantikan cara perladangan tebas dan bakar yang selama ini dilakukan di Sumatra Timur (Reid, 1970).

Tabel 2
Penduduk Onderafdeling Simalungun, 1930*

	Jumlah	%
Suku Batak:		
Simalungun	76.759	26,90
Toba	45.603	15,98
Mandailing	3.343	1,17
Karo	2.245	0,79
Angkola	1.543	0,54
Padanglawas	13	0,01
Pakpak	8	0
Lainnya	585	0,21
Jumlah	130.099	45,6
Indonesia lainnya	138.167	48,43
Cina	14.047	4,92
Eropa	1.562	0,55
Asia lainnya	1.426	0,50
Jumlah	285.301	100,00

* Tidak termasuk kota Pematangsiantar
Sumber: Volkstelling 1930; 30-31, 113

Selain membuka persawahan, jumlah orang yang bekerja di daerah perkebunan pun semakin besar. Di Dolok Merangir terdapat 10 KK ditambah pemuda-pemuda yang bekerja di rumah sakit dan perkebunan. Di Dolok Ilir terdapat sekitar 600 orang, sebagian ada yang bekerja di pabrik dan juga

diberitakan bahwa hampir setiap hari muncul pendatang baru dari Tapanuli di daerah itu. Di Laras lebih dari 40 KK ditambah pemuda-pemuda, ada yang bekerja di rumah sakit dan di kebun H.V.A. Di Serbelawan terdapat beberapa keluarga dan di Bandar Betsi lebih dari 4 KK. Di Bangun terdapat 6 KK yang semuanya krani kebun, di Bah Jambi sebanyak 25 KK, Bukit Maraja 7 KK, Kerasaan 4 KK, Dolok Sinembah 6 KK ditambah pemuda dan di Bosar Malingas 4 KK ditambah pemuda. Selain itu, masih ada yang bekerja di Balimbangan, Pagar Jawa, Bah Kapul, Mahonda, Marihat Ulu, Bah Kasinder, Parmonangan, Birong Ulu, dan Sidamanik (Situmeang, 1931).

Sampai tahun 1930-an hampir seluruh hutan belantara telah habis ditebas menjadi persawahan, perladangan dan perkebunan-perkebunan besar. Selain penduduk asli setempat, dua dari suku bangsa yang jumlahnya sangat dominan di Simalungun adalah Batak Toba dari Tapanuli dan orang Jawa dari Pulau Jawa. Kaum tani Batak Toba membuka persawahan, sedangkan orang Jawa yang didatangkan dalam jumlah yang besar sebagai pekerja di perkebunan. Dalam "Memorie van Overgave van de Afdeling Simaloengoen en de Karolanden", Maindersma mengemukakan bahwa pada tahun 1938 orang Batak Toba dan orang Jawa merupakan penduduk utama di beberapa distrik di wilayah Landscap Tanah Jawa dan Siantar. Orang Batak Toba lebih banyak dari penduduk asli (Simalungun) di empat dari delapan distrik yang ada di Simalungun, yaitu di Tanah Jawa, Jorlang Hataran, Dolok Panribuan, dan Siantar. Keempat distrik itu berada di wilayah Simalungun Bawah, daerah persawahan yang subur. Orang Jawa dominan berada di distrik Bosar Malingas, Jorlang Hataran, dan Bandar (Tabel 3). Pada umumnya orang Jawa bekerja di perkebunan dan menjalani kontrak selama puluhan tahun. Kedua golongan suku bangsa ini tidak kecil peranannya bagi perkembangan daerah Simalungun untuk mencapai kemajuan-kemajuan di bidang pertanian.

Selain kehadiran perkebunan, pengembangan daerah-daerah perkotaan merupakan komponen lain dari perubahan sosial di Simalungun pada masa kolonial. Menurut Liddle (1970) perubahan sosial yang terjadi di Simalungun pada dasarnya disebabkan oleh 3 faktor, yaitu kekristenan, pendidikan, dan perkembangan komunikasi. Selain Pematang Siantar yang sudah mulai berkembang pada dasawarsa pertama abad 19, belakangan muncul kota-kota baru yang lain seperti Pematang Tanah Jawa, Perdagangan, dan Serbelawan yang lokasinya dekat ke perkebunan dengan komposisi etnis yang berbeda.

Sampai akhir kolonial, penduduk yang tinggal di Simalungun menyumbangkan dan memberikan kontribusi sesuai dengan jenis pekerjaan dan tempat tinggal masing-masing. Orang Cina umumnya memegang sektor perdagangan di kota-kota Simalungun Bawah dan sebagian lagi menjadi

pekerja di perkebunan. Orang Batak Toba sebagian menjadi pegawai pemerintah dan perkebunan, sebagian kecil pedagang dan banyak yang tetap bekerja di bidang pertanian pangan. Orang Tapanuli Selatan sebagian berdagang, pegawai pemerintah, dan guru sekolah Islam (Liddle, 1970).

Tabel 3
Penduduk menurut Suku Bangsa
di Landschap Tanah Jawa dan Siantar, 1938 (%)

Distrik	Batak Simalungun	Batak Toba	Jawa	Batak Karo	Jumlah
Bosar maligas	51	3	39	-	100
Tanah Jawa	28	56	14	1	100
G. Sipanganbolon	95	5	-	-	100
Jorlang Hataran	24	38	38	-	100
Dolok Panribuan	36	48	16	-	100
Bandar	22	10	54	-	100
Siantar	27	37	33	-	100
Sidamanik	43	23	32	-	100
Jumlah	40,8	27,5	28,5	0	100

Sumber: Oudemans, 1973: 17

Keadaan pada masa kolonial tentu berbeda dengan keadaan sesudah pendudukan Jepang. Kalau pada masa kolonial tidak terpikirkan untuk menduduki tanah-tanah perkebunan, sesudah pendudukan Jepang semuanya berubah. Sekitar setahun setelah pendudukan, kempetai Jepang memberikan kesempatan bagi penduduk untuk menanam tanaman pangan di dalam perkebunan sesuai dengan kebijakan mereka untuk mempertahankan persediaan pangan dalam jumlah yang cukup selama peperangan. Hal tersebut mempercepat gerak sebagian besar petani, terutama bekas buruh perkebunan untuk menggarap lahan pertanian yang lebih luas untuk memenuhi kelangsungan hidupnya. Petani-petani Batak Toba dari Tapanuli tidak ketinggalan memasuki daerah-daerah perkebunan dan menguasai lahan pertanian yang cocok untuk tanaman pangan (Tobing, 1953). Sebagian dari mereka membuka kebun dan mendirikan rumah karena banyak yang pindah dari kampungnya ke lahan perkebunan yang digarapnya menjadi tanah pertanian. Makin lama makin tersebarlah kaum tani di daerah perkebunan. Pada masa itu rakyat bebas memilih tanah yang disukainya untuk dijadikan tanah persawahan. Data-data yang dikumpulkan oleh A. Pandiangan menunjukkan bahwa luas persawahan di Simalungun naik sekitar 31 persen antara tahun 1942 dan 1944 (Liddle, 1970).

Pendudukan Jepang juga membawa pengaruh, terutama kepada kaum muda. Mereka dilatih dan diajarkan nasionalisme militer yang tinggi dengan perasaan-perasaan anti Barat yang sangat kuat di pusat-pusat latihan pemuda, seperti yang terdapat di Nagahuta. Masa ini amat mengesankan dan merupakan suatu peristiwa yang penting bagi pemuda-pemuda sebagai lanjutan dari makna Sumpah Pemuda, untuk membaurkan mereka dalam kelompok berbagai suku bangsa, dalam kesatuan pejuang di berbagai daerah. Kempetai Jepang memobilisasi rakyat untuk bergotong royong secara paksa membuka jalan. Orang Batak Toba dari Simalungun ada juga yang dikirim ke Aceh Tengah untuk membuka jalan Blangkejeren-Takengon (Sihombing, 1948).

Sampai akhir pendudukan Jepang, dilihat dari tempat tinggalnya, orang Batak Toba menempati sepanjang jalan utama dari Danau Toba ke Simalungun Bawah dan di dalam dan sekitar kota Pematang Siantar. Mereka memperluas persawahan dan menguasai lahan-lahan yang tidak berpengaruh (Oudemans, 1973).

Baru beberapa bulan sesudah proklamasi kemerdekaan, revolusi sosial di Simalungun meletus pada Maret 1946. Raja-raja Simalungun yang selama ini dipandang sebagai kaum feodal menjadi sasaran revolusi yang dilancarkan sejak 3 Maret 1946. Raja yang dianggap bekerja sama dengan Belanda untuk menegakkan kekuasaannya pada masa kolonial mendapat kecaman yang hebat dan mereka dituntut agar turun dari tahtanya. Revolusi ini berhasil menangkap dan membunuh beberapa orang raja beserta keluarga. Barisan Harimau Liar (BHL) yang dipimpin oleh Saragi Ras memegang peranan utama untuk menangkap mereka (Liddle, 1970; Batara Sangti, 1977; Reid, 1979). Urbanus Pardede beserta partainya mengambil alih pemerintahan dari tangan Madja Purba, yang baru beberapa bulan diangkat sebagai pejabat wakil pemerintah di Simalungun (Damanik, 1974). Revolusi sosial merupakan cambuk bagi keluarga raja Panai, Raya, dan Purba. Sementara itu, partai-partai yang ada menyusun kekuatan untuk memilih pimpinan, mengganti raja-raja yang meninggal atau yang telah digulingkan dari singgasana. Pada waktu itu ada diantara *penatua* gereja menjadi camat karena masyarakat memberikan kepercayaan yang lebih besar bagi mereka (Sihombing, 1948). Orang Batak Toba yang terdiri dari pekerja di perkebunan, bekas laskar rakyat, termasuk yang baru datang dari daerah Tapanuli Utara maupun yang sudah lama tinggal di sekitar Simalungun berbaur dengan pejuang-pejuang lain di daerah itu. Revolusi ini telah mengakhiri kekuasaan feodal di Simalungun.

pekerja di perkebunan. Orang Batak Toba sebagian menjadi pegawai pemerintah dan perkebunan, sebagian kecil pedagang dan banyak yang tetap bekerja di bidang pertanian pangan. Orang Tapanuli Selatan sebagian berdagang, pegawai pemerintah, dan guru sekolah Islam (Liddle, 1970).

Tabel 3
Penduduk menurut Suku Bangsa
di Landschap Tanah Jawa dan Siantar, 1938 (%)

Distrik	Batak Simalungun	Batak Toba	Jawa	Batak Karo	Jumlah
Bosar maligas	51	3	39	-	100
Tanah Jawa	28	56	14	1	100
G. Sipanganbolon	95	5	-	-	100
Jorlang Hataran	24	38	38	-	100
Dolok Panribuan	36	48	16	-	100
Bandar	22	10	54	-	100
Siantar	27	37	33	-	100
Sidamanik	43	23	32	-	100
Jumlah	40,8	27,5	28,5	0	100

Sumber: Oudemans, 1973: 17

Keadaan pada masa kolonial tentu berbeda dengan keadaan sesudah pendudukan Jepang. Kalau pada masa kolonial tidak terpikirkan untuk menduduki tanah-tanah perkebunan, sesudah pendudukan Jepang semuanya berubah. Sekitar setahun setelah pendudukan, kempetai Jepang memberikan kesempatan bagi penduduk untuk menanam tanaman pangan di dalam perkebunan sesuai dengan kebijakan mereka untuk mempertahankan persediaan pangan dalam jumlah yang cukup selama peperangan. Hal tersebut mempercepat gerak sebagian besar petani, terutama bekas buruh perkebunan untuk menggarap lahan pertanian yang lebih luas untuk memenuhi kelangsungan hidupnya. Petani-petani Batak Toba dari Tapanuli tidak ketinggalan memasuki daerah-daerah perkebunan dan menguasai lahan pertanian yang cocok untuk tanaman pangan (Tobing, 1953). Sebagian dari mereka membuka kebun dan mendirikan rumah karena banyak yang pindah dari kampungnya ke lahan perkebunan yang digarapnya menjadi tanah pertanian. Makin lama makin tersebarlah kaum tani di daerah perkebunan. Pada masa itu rakyat bebas memilih tanah yang disukainya untuk dijadikan tanah persawahan. Data-data yang dikumpulkan oleh A. Pandiangan menunjukkan bahwa luas persawahan di Simalungun naik sekitar 31 persen antara tahun 1942 dan 1944 (Liddle, 1970).

Pendudukan Jepang juga membawa pengaruh, terutama kepada kaum muda. Mereka dilatih dan diajarkan nasionalisme militer yang tinggi dengan perasaan-perasaan anti Barat yang sangat kuat di pusat-pusat latihan pemuda, seperti yang terdapat di Nagahuta. Masa ini amat mengesankan dan merupakan suatu peristiwa yang penting bagi pemuda-pemuda sebagai lanjutan dari makna Sumpah Pemuda, untuk membaurkan mereka dalam kelompok berbagai suku bangsa, dalam kesatuan pejuang di berbagai daerah. Kempetai Jepang memobilisasi rakyat untuk bergotong royong secara paksa membuka jalan. Orang Batak Toba dari Simalungun ada juga yang dikirim ke Aceh Tengah untuk membuka jalan Blangkejeren-Takengon (Sihombing, 1948).

Sampai akhir pendudukan Jepang, dilihat dari tempat tinggalnya, orang Batak Toba menempati sepanjang jalan utama dari Danau Toba ke Simalungun Bawah dan di dalam dan sekitar kota Pematang Siantar. Mereka memperluas persawahan dan menguasai lahan-lahan yang tidak berpengaruh (Oudemans, 1973).

Baru beberapa bulan sesudah proklamasi kemerdekaan, revolusi sosial di Simalungun meletus pada Maret 1946. Raja-raja Simalungun yang selama ini dipandang sebagai kaum feodal menjadi sasaran revolusi yang dilancarkan sejak 3 Maret 1946. Raja yang dianggap bekerja sama dengan Belanda untuk menegakkan kekuasaannya pada masa kolonial mendapat kecaman yang hebat dan mereka dituntut agar turun dari tahtanya. Revolusi ini berhasil menangkap dan membunuh beberapa orang raja beserta keluarga. Barisan Harimau Liar (BHL) yang dipimpin oleh Saragi Ras memegang peranan utama untuk menangkap mereka (Liddle, 1970; Batara Sangti, 1977; Reid, 1979). Urbanus Pardede beserta partainya mengambil alih pemerintahan dari tangan Madja Purba, yang baru beberapa bulan diangkat sebagai pejabat wakil pemerintah di Simalungun (Damanik, 1974). Revolusi sosial merupakan cambuk bagi keluarga raja Panai, Raya, dan Purba. Sementara itu, partai-partai yang ada menyusun kekuatan untuk memilih pimpinan, mengganti raja-raja yang meninggal atau yang telah digulingkan dari singgasana. Pada waktu itu ada diantara *penatua* gereja menjadi camat karena masyarakat memberikan kepercayaan yang lebih besar bagi mereka (Sihombing, 1948). Orang Batak Toba yang terdiri dari pekerja di perkebunan, bekas laskar rakyat, termasuk yang baru datang dari daerah Tapanuli Utara maupun yang sudah lama tinggal di sekitar Simalungun berbaur dengan pejuang-pejuang lain di daerah itu. Revolusi ini telah mengakhiri kekuasaan feodal di Simalungun.

Tabel 4
Penduduk Simalungun Berdasarkan Kelompok Etnis Utama, 1962* (%)

	Jumlah Penduduk	Batak Simalungun	Batak Toba	Jawa	Lain-lain
Simalungun Atas:					
Silimakuta	10.246	90	2 (205)	0,5	7,5
Purba	13.076	95	2 (262)	0	3
Dolok Silou	6.737	95	1 (67)	1	3
Silou Kahaen	9.906	85	2 (198)	10	3
Raya Kahaen	6.760	90	3 (203)	2	5
Dolok Pardamean	11.054	80	15 (1658)	2,5	2,5
Raya	19.250	95	2 (385)	2	1
Jumlah	77.029		-2987		
Simalungun bawah:					
Sidamanik	28.543	30	20 (5709)	30	20
Panai Tongah	38.210	30	30 (11463)	30	10
Jorlang Hataran	12.710	20	50 (6355)	20	10
Tanah Jawa	95.576	20	30 (28673)	30	20
Bosar Maligas	48.801	20	30 (14640)	30	20
Dolok Panribuan	15.105	10	60 (9063)	10	20
Girsang	5.976	10	70 (4183)	2,5	17,5
Sipanganbolon					
Dolok Batunanggar	44.145	30	20 (8829)	40	10
Bandar	97.477	30	20 (19495)		10
Jumlah	324.280		-108410	40	
Jumlah	401.309		111.388		

* Tidak termasuk penduduk Pematangsiantar (62.263 jiwa), diantaranya 10% Batak Simalungun, 40% Batak Toba, 40% Jawa dan 10% suku bangsa lainnya.

Angka yang di dalam kurung dihitung berdasarkan angka-angka persentase.

Sumber: Oudemans, 1973; 113

Perjuangan dan kegelisahan penduduk ternyata belum selesai dengan berakhirnya revolusi sosial. Agresi I tahun 1947 yang dilancarkan pasukan Belanda dan Sekutu menyebabkan banyak penduduk yang mengungsi ke daerah yang dianggap lebih aman. Ada yang sampai ke Tapanuli melewati jalan-jalan setapak dan hutan. Di tengah perjalanan ada yang meninggal akibat

aksi penodong dan banyak yang kehilangan barang-barangnya karena dirampas orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, tidak berapa lama kemudian mereka kembali lagi ke Simalungun setelah keributan itu mereda (Sihombing, 1961; Panitia, 1982; Hutasoit, 1986). Pada dasarnya, tujuan agresi ini, khususnya di daerah perkebunan Sumatra Timur, ialah untuk memulihkan hak raja dan kaum kapitalis asing atas perkebunan yang masih terikat dalam kontrak, yang telah diterlantarkan sejak pendudukan Jepang. Pengumuman singkat dengan apa yang disebut dengan Garis Demarkasi van Mook pada tanggal 29 Agustus 1947 (Pelzer, 1978) dapat dipandang sebagai kelanjutan hasrat mereka untuk mengembalikan hak pemodal asing atas lahan perkebunan tersebut. Namun dalam kenyataannya, pendudukan lahan-lahan tersebut tidak dapat direalisasikan dalam jangka waktu singkat dan kaum tani yang mengusahakannya tidak rela menyerahkan dan meninggalkan lahan yang sudah dianggap menjadi miliknya. Hingga pengakuan kedaulatan, lahan-lahan perkebunan yang sudah diusahakan penduduk belum dapat diselesaikan sepenuhnya.

Tabel 5
Penduduk Simalungun berdasarkan Daerah Tempat Tinggal
dan Pekerjaan, 1963-1964

Kelompok Etnis	Status	Agama	Tempat Tinggal	Pekerjaan
Batak Simalungun	Penduduk setempat	Mayoritas Protestan	Simalungun Atas	Petani padi, ladang
Batak Tapanuli Utara	Pendatang	Protestan	Simalungun Bawah, Jalan ke Prapat, P. Siantar	Pekerja terdidik, pedagang, petani padi sawah
Batak Tapanuli Selatan	Pendatang	Islam (Santri)	Simalungun bawah, P. Siantar	Pedagang, Guru-guru agama Islam
Jawa	Pendatang	Islam (Abangan)	Simalungun Bawah, P. Siantar	Pekerja di kota, Pekerja di kebun, Petani ladang

Sumber: Liddle, 1970: 58

Sebagaimana pada masa kolonial, orang Batak Toba, orang Jawa, dan pendatang lainnya lebih dominan tinggal di Simalungun Bawah. Irigasi untuk persawahan dan kesuburan lahannya memberikan prospek yang lebih cerah dibandingkan dengan di Simalungun Atas. K. Sipayung (1969) menyatakan bahwa tahun 1962 jumlah pendatang tetap dominan tinggal di Simalungun Bawah. Pada tahun itu diperkirakan sebanyak 2.978 orang Batak Toba tinggal di Simalungun Atas dan 108.410 orang tinggal di Simalungun Bawah (Tabel 4). Dengan demikian, diperkirakan sebanyak 111.388 atau sekitar 27,8% dari

jumlah penduduk tersebut adalah orang Batak Toba dengan pekerjaan yang beraneka ragam. Tahun 1963-1964 menurut Liddle (1970), orang Batak Simalungun yang kebanyakan tinggal di Simalungun Atas pada umumnya bekerja sebagai petani ladang. Sebaliknya, Batak Toba yang tinggal di Simalungun Bawah bekerja sebagai pekerja terdidik, pedagang, dan petani padi sawah. Kaum pendatang lainnya, seperti Batak Angkola dan Mandailing, sebagai pedagang atau guru agama Islam. Orang Jawa ada yang bekerja di perkebunan, pekerja di kota, atau petani padi ladang (Tabel 5).

Konflik: Penyebab Perpindahan ke Daerah Lain

Keberhasilan strategi pemerintah kolonial untuk mempercepat perpindahan melalui pemberian jabatan "kepala" ternyata tidak terlepas dari masalah yang berkaitan dengan status orang yang pindah tersebut. Pada waktu itu Tapanuli telah menjadi daerah "langsung" diperintah oleh Gubernur Belanda, sedangkan Simalungun (dan Sumatra Timur) adalah kerajaan-kerajaan yang diperintah secara tidak langsung oleh Belanda. Selaras dengan itu menjadi penting dipertanyakan, kepada siapa kaum tani yang akan pindah tersebut "patuh" dan melaksanakan kewajibannya, apakah kepada raja-raja Simalungun atau kepada pemerintah kolonial. Hal ini juga disebabkan oleh kenyataan bahwa suku Batak Toba sangat otonom di kampung halaman masing-masing. Batara Sangti (1977) mengemukakan bahwa status ini telah dipertanyakan kaum tani sebelum mereka diberangkatkan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, jelas bahwa orang Batak Toba yang pindah ke Simalungun adalah kawula Gubernur Belanda dan, dengan demikian, tidak tunduk kepada perintah raja-raja Simalungun. Menyadari hal tersebut pada tahun 1914 pemerintah kolonial terpaksa mengangkat kepala-kepala orang Toba yang khusus dan seluruhnya terlepas dari para raja Simalungun (Sangti, 1977). Hal ini ternyata kurang diterima di hati raja-raja setempat karena mereka menganggap bahwa penduduk pendatang seperti orang Jawa, Mandailing, Padang, dan lain-lain, juga rakyat raja-raja tersebut. Hal itu tentu bertolak belakang dengan pandangan bahwa kaum pribumi pendatang harus tunduk kepada siapa mereka secara teoretis patuh dan melaksanakan kewajibannya (Reid, 1987). Ketidaksenangan akan status para pendatang tersebut dan adanya protes raja-raja Sumatra Timur (Meuraxa, 1973; Sangti, 1977) dengan dalih bahwa mereka diperintah secara tidak langsung oleh Belanda sehingga tahun 1918 para pendatang harus tunduk kepada raja-raja setempat. Akhirnya, kaum tani Batak Toba yang pindah ke Simalungun, secara *de jure* berada di bawah raja Simalungun pada waktu

itu. Sejak itu raja-raja Simalungun mulai membuat aturan tersendiri bagi kaum pendatang sesuai anggapan mereka mengenai status kaum pendatang tersebut, yang kelak memacu timbulnya konflik.

Orang Batak Toba tidak puas dengan perubahan, terutama dengan kewajiban membayar pajak irigasi yang semakin meningkat. Sejak tahun 1926 muncul protes keras terhadap raja-raja Simalungun sehubungan dengan pembebanan pajak irigasi yang cukup tinggi, yang sebelumnya tidak dikenal di Tapanuli. Orang Batak Toba mengajukan protes dengan keras, bahkan juga disalurkan lewat Volkstraad di Batavia (Exerman, 1926; van Kempen, 1928). Banyak dari antara kaum tani yang menolak membayar pajak yang dinaikkan tersebut. Hal ini menggambarkan bahwa kaum tani itu tidak menerima sepenuhnya pembebanan pajak irigasi itu sebab dalam benaknya mereka keberatan di bawah perintah raja-raja kecil itu dan merasa lebih cerdas daripada mereka (Meuraxa, 1973; Sangti, 1977). Di samping itu, orang Batak Toba yang berjiwa dinamis dan demokratis itu memandang dan menganggap pihak raja-raja Simalungun tidak lebih dari saudaranya sendiri sebagai kepala masyarakat hukum adat *Dalihan Na Tolu*, yang harus dihormati dan dipatuhi dalam batas-batas tertentu di daerahnya.

Masalah pembebanan pajak irigasi yang berulang kali dinaikkan dan berlanjut dengan pemecatan kepala kampung memicu konflik terbuka. Pemecatan yang diprakarsai oleh kontrolir Siantar tanpa mendapat teguran dari pihak atasan (Sangti, 1977) telah dipandang orang Batak Toba sebagai persekongkolan antara raja-raja Simalungun dengan pemerintah kolonial untuk memperkuat feodalisme dan kolonialisme. Hasil pembangunan yang begitu rupa seperti durian runtuh tiba-tiba, menyebabkan kantong pihak raja-raja dan kas pemerintah swapraja-swapraja Simalungun mendadak kaya raya dan bahkan menyebabkan raja-raja, terutama Siantar, Tanah Jawa, Panai, dan Raya bertambah angkuh dan bersifat feodal (Sangti, 1977). Mereka kurang menghargai kaum pribumi pendatang yang telah bekerja membangun daerah Simalungun dari hutan belantara menjadi gudang beras dan daerah perkebunan. Dengan diprakarsai dan dihasut oleh para kepala kampung yang merasa kecewa karena dipecat (Nioboer, 1935) menyebabkan sekitar 400 KK atau lebih dari 2.000 orang petani Batak Toba pindah dari Panai ke daerah Padang Begadai, Deli Serdang. Uraian yang lebih panjang lebar tentang migrasi Batak Toba ke Padang Bedagai ini telah ditulis oleh W. Roll (1995) dalam satu makalah yang diterbitkan di Jerman.

Daftar Pustaka

- Aritonang, Jan A. 1988. *Sejarah Pendidikan di Tanah Batak*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Batara Sangti. 1977. *Sejarah Batak*. Balige: Karl Sianipar Company.
- Burton, R. and N. Ward. 1826. "Report of a journey in to the Batak country in the interior of Sumatra in year 1824", in *Transaction of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland*. London: S.N., Vol. 1, pp. 485-513.
- Castles, Lance. 1967. "The Ethnic profile of Djakarta", *Indonesia* 1(3):153-204.
- Clauss, Wolfgang. 1982. *Economic and social change among the Simalungun Batak of North Sumatra*. Germany: Saarbrucken.
- Cunningham, Clark E. 1958. *The Postwar Migration of the Toba-Bataks to East Sumatra*. New Haven: Yale University Press. Cultural Report Series No. 5.
- Damanik, Jahutar. 1974. *Jalannya Hukum Adat Simalungun*. Pematangsiantar: S.N.
- Davis, J. Merle. 1938. *The Batak Church: an Account of the Organization, Policies dan Growth of the Christian, Community of the Bataks of Northern Sumatra*. New York: Department of Social and Industrial Research of the International Missionary Council.
- Department van Economishe Zaken. 1935. *Volkstelling 1930*. Batavia. Deel 4.
- Ezerman, H.E.K. 1926. *Memorie van Overgave van de Afdeling Simaloengoen en Karolanden*. Pematang Siantar: S.N. Mimeograph.
- Hutasoit, Marnixius. 1986. *Percikan Revolusi di Sumatra*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Joustra, M. 1915. *Van Medan Naar Padang En Terug*. Leiden: S.C. van Doesburgh.
- . 1926. *Batakspiegel*. Leiden: S.C van Doesburgh.
- Kempen, C.J. van. 1928. *Memorie van Overgave van de Oostkust van Sumatra*. Medan. Mimeograph.
- Keuning, J. 1958. *The Toba Batak, Formerly and Now*. Ithaca: Cornell University Press. Translated by Claire Holt.
- Liddle, R. William. 1970. *Ethnicity, Party and National Integration: an Indonesian Case Study*. New Haven: Yale University Press.
- Marbun, H. 1990. *Barita Djudjur Taon-Laporan Tahunan (1946-1960) (Doloksanggul Humbang, Bandar, Asahan, Deli Serdang, Medan Atjeh dan Medan Timur)*. Medan: Lembaga Penelitian Universitas HKBP Nommensen.
- Meuraxa, Dada. 1973. *Sejarah Kebudayaan Suku-suku di Sumatra Utara*. Medan: Sasterawan.
- Nieboer, E.G. 1935. *Aanvullenden Memorie van Overgave van de Afdeling Simaloengoen en de Karolanden*. Pematangsiantar. Mimeograph.
- Oudemans, Robert. 1973. *Simalungun Agriculture: some Ethno-Geographic Aspects of Dualism in North Sumatra Development*. Maryland: University of Maryland.
- Panjaitan, Kristian. 1923. "Sian Tano Simaloengoen: Balata", *Immanuel* (Lagoeboti) 18(2): 31-32.

- Pedersen, Paul Bodholdt. 1970. *Batak Blood and Protestant Soul: The Development of National Batak Churches in North Sumatra*. Michigan: Grand Rapids.
- Pelzer, Karl. J. 1978. *Planters and Peasant, Colonial Policy and the Agrarian Struggle in East Sumatra 1863-1947*. Leiden: KITLV Press (Verhandeligen 84).
- Purba, Elvis. 1992. "Aspek-aspek yang mempengaruhi perpindahan penduduk Batak Toba ke daerah Simalungun", *VISI*2(2): 398-417.
- . 2001. *Migrasi Batak Toba dalam Konteks Strategi Kolonial*. Mimeograph.
- Purba, OHS dan Elvis F. Purba. 1997. *Migrasi Spontan Batak Toba (Marserak): Sebab, Motif, dan Akibat Perpindahan Penduduk dari Dataran Tinggi Toba*. Medan: Monora.
- Reid, Anthony. 1979. *The Blood of the People: Revolution and the End of Traditional Rule in Northern Sumatra*. Kuala Lumpur: Oxford University Press.
- Roll, Werner. 1995. *Die Zuwanderung der Toba Batak nach Padang Begadai, Ein Beitrag zur Migrationsforschung in Nordsumatra Indonesia*. Zurich: Verlag Ruegger.
- Saragih, Jasamen. 1979. *The Impact of Christianization in Simalungun North Sumatra 1903-1963*. Thesis S2, University of Sydney. Unpublished.
- Sihombing, J. 1948. "Barita ni HKBP di taon 1946", dalam *Almanak HKBP 1946* (Pearaja Tarutung). S.L.: S.N., hlm. 65-85.
- . 1961. *Saratus Taon Huria Kristen Batak Protestan*. Medan: Philemon & Liberty.
- Simon G. 1904. *Tole, Vorwärts*. S.L.: Gutersloh.
- Sipayung, K. 1969. *Keterangan Peta Penduduk Kabupaten Simalungun. Pematangsiantar*: S.N.
- Sitompul, A.A. 1986. *Perintis Kekristenan di Sumatra Bagian Utara*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Situmeang, P.E. 1931. Barita Ni Hoeria na Parsarahan, *Immanuel* (Lagoeboti) 18(1): 23-24; 25. (1): 31-32; 1.2: 39; 8(2): 47-48.
- Tideman, J. 1922. *Simaloengoen: Het Land der Timoer-Bataks in Zijn Vroegere Isolatie en Zijn Ontwikkeling tot een Deel van het Cultuurgebied van de Oostkust van Sumatra*. Leiden: S.C van Doesburg.
- Tobing, K. 1953. *Sumatra Utara dengan Soal-soal Perkebunan, Pembagian Tanah, Buruh dan Tani, Pendidikan, Usaha dan Ekonomi*. Jakarta: Lintasan Masa.
- Vergouwen, J.C. 1964. *The Social Organization and the Customary Law of the Toba Batak of Northern Sumatra*. The Hague: Martinus.
- Vijf en Twintig Jaar Padang Missie 13 Juni '37, 1912-1937*. 1937. Padang.
- Warneck, D. Yoh. 1911. *50 Jahre Batakmission in Sumatra*. Berlin: Martin Warneck.